



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2824>

### IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN MASALAH KEBIJAKAN UNTUK PENGEMBANGAN WISATA RELIGI DI DESA GIRI KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR

Endang Indartuti<sup>1</sup>, Kusnan<sup>2</sup>, Fanesa Nahdlatul Ulvia<sup>2</sup>, Setya Nanda Anggela Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

*Article history:*

Received date: 23 October 2021

Revised date: 20 April 2022

Accepted date: 22 April 2022

#### ABSTRACT

*The high number of tourists visiting Indonesia certainly has a positive impact on state revenues. Gresik Regency, East Java Province is considered to be a district that is successful in managing tourism potential in its area. Meanwhile, Giri Village is one of the villages that has received serious attention from the Gresik Regency government to be developed as a religious tourism village. However, the Gresik Regency Government still faces many obstacles, the most important problem is coordination between stakeholders regarding media promotion or information and transportation and management, this is because Giri Village still gets the title of a village in Gresik Regency. Therefore, the purpose of this study was to determine the policy problem in the Development of Religious Tourism in Giri Village, Kebomas District, Gresik Regency, East Java. This study uses a descriptive qualitative research method, with the object of research on policy formulation. The results of this study indicate that the policies made cannot represent the needs of the human resources that are there both in terms of economic, social, and cultural. There are several stakeholder groups involved in it, but there are no standard policies and separate policies between the Giri Village government, cemetery managers, and mosque managers.*

Keywords: *Tourism Village, management, formulation*

#### ABSTRAKSI

Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia tentu saja memberikan dampak positif pada pendapatan negara. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi kabupaten yang berhasil dalam mengelola potensi wisata yang ada di daerahnya. Sementara itu, Desa Giri adalah salah satu desa yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk dikembangkan sebagai desa wisata religi. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Gresik masih menghadapi kendala, masalah yang paling utama adalah koordinasi antar stakeholder terkait media promosi atau informasi dan transportasi serta pengelolaan, hal ini disebabkan Desa Giri masih mendapat predikat desa kumuh yang ada di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui masalah kebijakan dalam Pengembangan Wisata Religi di Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian pada tahapan formulasi kebijakan (perumusan kebijakan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bisa mewakili kebutuhan sumber daya manusia yang ada disana baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga terdapat beberapa kelompok stakeholder yang terlibat didalamnya namun tidak terikat pada satu kebijakan yang

baku dan menghasilkan kebijakan-kebijakan tersendiri baik itu antara pemerintah Desa Giri, pengelola makam, dan pengelola masjid.

Kata kunci: Desa Wisata, manajemen, formulasi

2022 UPNVJT. All rights reserved

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan favorit wisatawan karena mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang unik dan menarik. Sehingga tidak mengherankan jika jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara (wisman) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perjalanan wisatawan nusantara 2016 mengalami kenaikan sebesar 7,9 juta orang dan kenaikan tertinggi terjadi pada 2018, yaitu 32,5 juta orang (BPS, 2018). Sementara itu, rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia dalam lima tahun terakhir (2014-2018) mencapai 14% per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisman pada periode 2009-2013 yang sebesar 9% per tahun. Data BPS menjelaskan bahwa kunjungan wisman pada 2009 tercatat sebanyak 6,32 juta orang. Angka ini terus meningkat menjadi 8,8 juta orang pada akhir 2013. Pada 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 15,81 juta orang atau tumbuh sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan 2009 (Widowati, 2019). Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung di Indonesia tersebut tentu saja memberikan dampak positif pada pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir sektor pariwisata di Indonesia mampu menyumbangkan devisa yang terus meningkat secara signifikan. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Sumbangan dan Target Devisa dari Sektor Pariwisata**  
(Sumber : Sofia, 2017).

Gambar 1 memperlihatkan tentang sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat dari 12 miliar dolar AS pada 2015, menjadi 13,6 miliar dolar AS di 2016, dan naik lagi menjadi 15 miliar dolar AS pada 2017. Pada 2018 ditargetkan meraup devisa 17 miliar dolar AS serta pada 2019 ditargetkan menjadi penyumbang devisa nomor 1 mengalahkan sektor perekonomian lain dan proyeksi sebesar 20 miliar dolar AS.

Hal ini menandakan bahwa sektor pariwisata di Indonesia telah tumbuh sebagai industri yang menguntungkan dan memiliki prospek yang sangat cerah dikemudian hari bagi pembangunan. Secara politis telah disadari oleh pemerintah bahwa pariwisata adalah peluang bisnis untuk menyumbang devisa, penciptaan lapangan kerja, penciptaan kesempatan berusaha, menumbuhkan kebudayaan dan kesenian, dan juga sebagai upaya membina dan mengasah cinta tanah air bagi wisatawan. Artinya, industri kepariwisataan telah menampilkan peranannya dengan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya bangsa (Leman, 2018). Salah satu jenis pariwisata di Indonesia yang berkembang pesat adalah wisata pilgrim yaitu destinasi obyek wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat dan istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata pilgrim ini banyak dihubungkan oleh niat atau hasrat untuk mendapatkan restu, keteguhan iman dari leluhur yang dianggap suci (Pendit, 2003).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata religi. Destinasi wisata ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, akan tetapi yang menarik untuk diperhatikan adalah mayoritasnya pemeluk agama islam di Indonesia, hal ini juga tidak terlepas dari peran tokoh penyebaran agama islam di nusantara yang terpusat di wilayah Jawa. Keberadaan makam wali yang berada Jawa Timur terus memberikan pengaruh dan menjadi magnet wisata religi yang cukup unik. Wisata religi wali mampu menyedot perhatian wisatawan dan terbukti peningkatan jumlah wisatawan di destinasi obyek wisata religi melonjak hingga 30% (Leman, 2018). Kemudian hadirnya,

otonomi daerah semakin memberikan wewenang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di setiap wilayahnya masing-masing agar dapat membentuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Gresik dinilai menjadi kabupaten yang berhasil dalam mengelola potensi wisata yang ada di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Kabupaten Gresik meraih penghargaan *runner up* dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada ajang *East Java Tourism Award 2020* (Setiawan, 2020).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa Kabupaten Gresik sebagai “Kota Wali” harus bisa menggali dan memanfaatkan potensi atau karakter daerahnya sehingga bisa mengembangkan segmen wisata yang sesuai dengan kearifan lokal (As, 2021). Wisata religi di Kabupaten Gresik menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentunya sangat menguntungkan pemerintah dan juga masyarakat setempat. Pada 3 tahun terakhir ini jumlah wisatawan di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Abdul Hamid, mencontohkan wisata religi sunan giri menjadi penyumbang terbanyak retribusi PAD, yaitu menghasilkan kira-kira 2 miliar per tahun (Arivin, 2018). Besarnya kontribusi wisata religi pada PAD Kabupaten Gresik, maka pemerintah melalui Kemenparekraf mendorong pengembangan desa wisata religi. Karena desa wisata ke depan akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi, desa-desa wisata sebagai salah satu kekuatan pariwisata nasional sehingga dapat membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (As, 2021).

Jauh sebelum adanya dorongan dari Kemenparekraf untuk mengembangkan wisata desa, pemerintah Kabupaten Gresik telah lama melakukan pengembangan desa wisata, khususnya desa wisata religi. Desa Giri adalah salah satu desa yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk dikembangkan sebagai desa wisata religi. Desa yang terletak di Kecamatan Kebomas ini memiliki banyak obyek wisata religi, diantaranya: Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Tanggung Boyo, Makam Singoludro, Makam Syeich Khujjah, Makam Raden Supeno, dan Makam Sunan Giri. Sementara itu, obyek wisata religi yang terkenal di

Desa Giri adalah Makam Sunan Giri. Obyek wisata ini memiliki daya tarik tersendiri karena di sekitarnya terdapat wisata pendukung seperti Masjid Besar Ainul Yaqin Sunan Giri, Museum Sunan Giri, dan Pasar Sunan Giri ([desagiri.com](http://desagiri.com)). Sehingga sangat tepat apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Sunan Giri untuk mendukung percepatan pengembangan serta pengawasan dan pengelolaan obyek wisata Sunan Giri (Leman, 2018).

Sebagai salah satu obyek wisata religi yang banyak dikunjungi oleh berbagai lapisan seperti masyarakat umum, pelajar, instansi, bahkan wisatawan mancanegara, keberadaan Makam Sunan Giri juga membawa berkah bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonominya dengan menyediakan fasilitas parkir, transportasi, penginapan, toilet, berjualan keperluan ziarah, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Selain itu, wisata Makam Sunan Giri diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Desa Giri. Akan tetapi, dalam mengembangkan pariwisata khususnya pada obyek wisata religi, pemerintah Kabupaten Gresik masih banyak menghadapi kendala, masalah yang paling utama adalah kordinasi antar *stakeholder* terkait media promosi atau informasi dan transportasi serta pengelolaan. Hal yang perlu untuk diperhatikan adalah peran serta pemerintahan daerah dalam membuat sebuah kebijakan terkait pengembangan sektor pariwisata religi karena dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Kawasan Wisata dijelaskan bahwa pengelolaan serta pengembangan kawasan wisata khususnya pada wisata *pilgrim* berada pada tanggung jawab pemerintah daerah (Leman, 2018).

Oleh karena itu, pemerintah Desa Giri harus dilibatkan dalam pengelolaan Makam Sunan Giri dan obyek wisata religi lainnya. Hal ini penting dilakukan mengingat desa memiliki otonomi desa yang bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Adapun tujuan penelitian ini adalah identifikasi dan pemetaan masalah kebijakan untuk pengembangan wisata religi di Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

1. Kontribusi Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gresik Tahun 2009-2015 (Puteri Elmaningtias, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengembangan dan kontribusi kontribusi wisata religi Sunan Giri terhadap kesejahteraan masyarakat Gresik tahun 2009-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Historis (Sejarah). Adapun hasil penelitian ini diantaranya: (1) Otonomi daerah berdampak pada penataan areal wisata religi sunan giri, (2) Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2009 memberlakukan pajak retribusi makam Sunan Giri untuk mendongkrak pendapatan ekonomi tiap daerah, (3) Timbal balik adanya Pajak Retribusi makam Sunan Giri berupa bantuan renovasi fisik sekitar makam dan penataan tempat perbelanjaan oleh-oleh sehingga lebih tertata rapi.
2. Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik (Lutfi Andrianto Leman, 2018). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui stakeholders dan cara kolaborasi stakeholders dalam pengembangan pariwisata religi Sunan Giri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik berperan sebagai policy creator dan coordinator, UPT Sunan Giri yang berperan sebagai fasilitator, Yayasan makam sunan

giri (YAMSARI) sebagai implementator, Pemerintah desa giri sebagai akselelator, dan pihak Swasta yang berperan sebagai fasilitator. Kemudian pada aspek kolaborasi yang ada dalam pengembangan pariwisata Religi Sunan Giri menunjukkan arah pada Institutional Design dimana peran para stakeholder satu dengan yang lain tidak saling mengintervensi, dan dalam proses kolaborasi terdapat tujuan yang tepat serta terbentuknya target rencana kerja yang dapat mendekati pada tujuan yang ingin dicapai dalam mengenalkan destinasi wisata religi sunan giri pada pihak-pihak luar.

3. Analisis Potensi dan Interaksi Antar Objek Wisata Religi di Kabupaten Gresik (Iis Zuliana dan Sri Murtini, 2019). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi wisata, promosi wisata dan interaksi antar lima objek wisata religi di Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Sunan Giri, Sunan Prapen, Situs Giri Kedaton, makam Poesponegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lima wisata religi di Kabupaten Gresik memiliki kategori kelas sedang, pengelola tidak pernah melakukan promosi untuk setiap objek wisata religi, dan pergerakan wisatawan yang terjadi antar kelima objek wisata religi di Kabupaten Gresik terbesar terjadi pada makam Sunan Giri dan makam Maulana Malik Ibrahim. Hal ini diakibatkan karena potensi wisata yang ada pada kedua objek wisata tersebut memiliki pengelolaan yang lebih baik.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut belum ada yang fokus pada identifikasi dan pemetaan masalah kebijakan. Oleh karena, penelitian saat ini mencoba untuk melengkapi dan mengisi celah pada penelitian sebelumnya. Hal ini penting sekali untuk pengembangan wisata religi di Desa Giri karena dengan adanya pemetaan masalah kebijakan, pemerintah Desa Giri dapat membuat suatu kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

### **Kebijakan Publik**

Studi-studi yang dilakukan oleh Thomas R.

Dye (1998) menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan, karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. Terminologi “publik” memperlihatkan keleluasaan untuk didefinisikan, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa “publik” berkaitan erat dengan negara, pasar dan masyarakat sipil. Mereka yang kemudian menjadi pelaku dalam arena publik, sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakkan interaksi ketiga pelaku tersebut.

Sedangkan menurut Charles O. Jones (1991) terminologi “kebijakan publik” menunjuk kepada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas, mencakup anggaran dan struktur pelaksana. Hal ini dapat dijelaskan bahwa siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara, organisasi, atau perusahaan kepada amanat rakyat atau pemilik saham yang berdaulat. Kemungkinan publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yaitu: serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, serta kesempatan publik untuk memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, adanya ruang bagi publik untuk mengawasi penyimpangan pelaksanaan dan adanya mekanisme kontrol publik, yaitu proses yang memungkinkan keberadaan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set in dealing with a problem matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Menurut George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan public sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

### Perumusan Kebijakan Publik

Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analisis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2018), mengatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi : 1) Perumusan masalah (*problem formulation*), 2) Perumusan kebijakan (*policy formulation*), 3) Penentuan kebijakan (*policy adoption*). Sedangkan Menurut Dunn (2003) bahwa, proses pembuatan kebijakan publik mencakup antara lain : 1) Penyusunan agenda kebijakan, 2) Formulasi kebijakan. 3) Adopsi kebijakan. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli kebijakan publik tersebut diatas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu hukum yang mengatur arah dan kebijakan dari suatu pemimpin dalam pemerintahan yang disusun dan disepakati oleh masyarakat dan para pejabat yang berwenang yang diwujudkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, termasuk peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini sangat penting bagi kita untuk menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, dan mendorong kepada kita agar dapat memahami mengenai bagaimana proses kebijakan publik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- a. **Sifat dari masalah-masalah** itu sendiri berpengaruh terhadap implementasi program-program yang didesain untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai cara: **Pertama**, keputusan-keputusan kebijakan mencakup berbagai tingkat kesulitan teknis selama pelaksanaannya, sebagian diantaranya lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya. Dapat diharapkan bahwa pelaksanaan berbagai program tidak akan menghadapi masalah, seperti dalam kasus penutupan suatu kasino atau pembukaan sekolah baru di sebuah pemukiman baru, karena ini merupakan keputusan tunggal yang

pelaksanaannya dalam praktek bersifat agak rutin. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk program-program yang didesain untuk menghilangkan perjudian atau untuk meningkatkan standar pendidikan para murid. Sama halnya, program-program yang didesain untuk menghilangkan dan/atau mengurangi pencemaran belum ada teknologi yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara keseluruhan. Bahkan walaupun tersedia teknologi untuk itu, tapi teknologi tersebut mungkin lebih mahal dibandingkan dengan yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Sebagian masalah lebih sulit ditangani karena bersifat kompleks, atau saling tergantung satu sama lainnya, dalam hal ini bukan hanya mencakup satu keputusan, melainkan terdiri dari serangkaian keputusan mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan publik. **Kedua**, keanekaragaman masalah yang menjadi target dari suatu program pemerintah dapat membuat pelaksanaan program tersebut menjadi sulit. Masalah-masalah publik seperti kekerasan atau rendahnya prestasi pendidikan adalah berakar pada berbagai penyebab, sedangkan program-program yang didesain hanya untuk memecahkan satu atau banyak penyebab pada umumnya tidak dapat diharapkan untuk mencapai seluruh tujuan-tujuannya. Masalah kebutuhan di jalanan kota memiliki asal yang lebih sederhana dan oleh karena itu dapat dipecahkan secara lebih mudah. **Ketiga**, besarnya kelompok sasaran juga merupakan suatu faktor, karena semakin besar dan semakin beranekaragam kelompok sasaran tersebut, maka semakin sulit untuk mempengaruhi perilakunya ke arah yang diinginkan. Jadi, karena hanya sedikit jumlah kelompok sasaran yang terlibat, maka suatu kebijakan yang didesain untuk meningkatkan standar keselamatan dari mobil-mobil akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan kebijakan yang didesain untuk membuat agar ribuan pengemudi yang tidak cermat memperhatikan (mentaati) peraturan-peraturan keselamatan berlalu lintas. **Keempat**, tingkat perubahan perilaku

kelompok sasaran yang ingin dicapai melalui suatu kebijakan akan menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan yang didesain untuk menghilangkan sexism dan racism akan lebih sulit dilaksanakan, karena masalah ini memiliki akar yang dalam dari sistem budaya masyarakat, dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan yang didesain untuk meningkatkan penyediaan suplai listrik, yang sama sekali tidak membutuhkan perubahan perilaku pada pihak konsumen.

- b. **Selain sifat permasalahan** yang ingin dipecahkan melalui kebijakan, pelaksanaan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, teknologi, dan politik dari kebijakan tersebut. **Pertama**, perubahan kondisi sosial dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara melaksanakan program. Jadi, banyak masalah yang dihadapi oleh program jaminan sosial di negara-negara industri maju adalah timbul dari fakta bahwa program-program tersebut tidak didesain untuk menghadapi peningkatan proporsi manula atau tingkat pengangguran yang tinggi sehingga menimbulkan beban yang sangat berat terhadap dana publik. **Kedua**, perubahan kondisi ekonomi memiliki dampak yang sama terhadap pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, suatu program yang ditargetkan terhadap golongan miskin dan pengangguran akan mengalami perubahan-perubahan setelah terjadinya peningkatan atau penurunan ekonomi. Kondisi ekonomi juga bervariasi terhadap kawasan, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dan pengarahan yang lebih besar dalam pelaksanaannya. **Ketiga**, ketersediaan teknologi baru juga dapat diharapkan akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam kebijakan. Sebagai contoh, kebijakan pengendalian pencemaran sering sekali mengalami perubahan dalam pelaksanaannya setelah ditemukan teknologi yang lebih efektif atau lebih murah. **Keempat**, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan

pekerjaan. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri. Sebagai contoh, banyak pemerintahan konservatif yang telah diketahui akan mengetatkan ketersediaan program-program jaminan sosial yang telah diadakan pemerintahan buruh atau sosialis tanpa harus mengubah kebijakan itu sendiri.

Organisasi dari aparat administratif yang bertugas melaksanakan suatu kebijakan juga memiliki dampak yang tidak lebih kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya yang telah dikemukakan. Pelaksanaan kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh konflik-konflik intraorganisasional dan interorganisasional yang umum terjadi dalam proses kebijakan publik. Dalam pemerintahan sering sekali terdapat organisasi-organisasi birokratis yang berbeda-beda dan mereka terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat pemerintahan yang berbeda-beda (tingkat nasional, provinsi, dan lokal), dan masing-masing memiliki kepentingan, ambisi, dan tradisi sendiri-sendiri yang dapat menghambat proses pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Bagi banyak badan, pelaksanaan mungkin dipandang hanya sebagai suatu kesempatan untuk melanjutkan perjuangan setelah mereka kalah pada tahap perumusan kebijaksanaan. Sumberdaya politik dan ekonomi dari kelompok sasaran juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Kelompok-kelompok yang kuat yang dipengaruhi oleh suatu kebijakan akan dapat mengkondisikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan jalan mendukung atau menentangnya. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan sering sekali mengadakan kompromi-kompromi dengan kelompok-kelompok seperti ini agar tugas melaksanakan kebijakan tersebut menjadi lebih mudah. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Banyak kebijakan yang mengalami penurunan dukungan setelah diadopsi, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pelaksananya untuk menyimpang dari tujuan semula. Tentu saja pelaksanaan tersebut juga dapat menyelenggarakan *polling survey* untuk membenarkan kelanjutan pelaksanaan program-program dalam menghadapi tuntutan para pengambil kebijakan atau kelompok-

kelompok yang ingin mengubah kebijakan tersebut. Banyak di antara usaha-usaha dari pihak pemerintah maupun warga negara untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih aman telah mengalami 'realita' pelaksanaan tersebut di atas. Hal ini bukan hanya telah mengakibatkan timbulnya pemahaman yang lebih baik terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi terhadap pelaksanaan kebijakan, melainkan juga telah mengakibatkan timbulnya usaha-usaha mendesain kebijakan dengan cara yang dapat menawarkan peluang berhasil cukup besar dalam pelaksanaannya. Walaupun banyak di antara keputusan pemerintah yang akan tetap diambil tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, namun sekarang telah semakin luas pengakuan terhadap perlunya mempertimbangkan hal ini pada tahap-tahap yang lebih dini dalam proses kebijakan, akan jauh lebih mudah bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan, dan memberikan respons yang sesuai secara *ex ante* daripada secara *ex post*.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya adalah sebagai berikut : (Tachjan, 2006 ). **Pertama**, pengambil kebijakan harus menjelaskan tujuan-tujuan dari kebijakan dan urutan relatifnya dengan cara yang sejelas mungkin. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan ini dapat berfungsi sebagai suatu instruksi yang jelas bagi para pelaksana mengenai apa yang sebenarnya diharapkan mereka lakukan dan bagaimana prioritas yang harus mereka berikan terhadap tugas-tugas tersebut. **Kedua**, kebijakan harus didukung secara implisit atau eksplisit oleh suatu teori kausal yang layak dalam kaitannya dengan mengapa langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut dapat diharapkan memecahkan masalah yang dihadapi. Suatu kebijakan yang didesain untuk mendorong orang agar membuat tabungan yang cukup besar bagi hari tua mereka harus dapat dengan jelas menjelaskan mengapa orang tidak menabung cukup banyak sekarang sehingga kebijakan tersebut perlu dilaksanakan. **Ketiga**, kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya. Salah satu di antara cara-cara yang paling jelas untuk mematikan sebuah program

adalah dengan jalan tidak menyediakan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Menurut Dunn (2003) Metodologi Analisis Kebijakan yang berfokus pada perumusan masalah : Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan; Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu; Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002): (1) Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat; (2) Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan; (3) Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan; (4) Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain; (5) Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain; (6) Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan; dan (7) Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggali dan memahami bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau manusia. Proses penelitian mencakup pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan, analisis data secara induktif membangun tema dari tema khusus ke tema umum (Creswell, 2009). Sedangkan tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menurut Neuman (2015) berarti menyediakan gambaran terperinci dan sangat akurat, menemukan data baru yang bertentangan dengan data lama, menciptakan serangkaian kategori atau mengklasifikasi jenis, menjelaskan rangkaian tahapan atau langkah, mendokumentasikan proses atau mekanisme sebab akibat, melaporkan latar belakang atau konteks situasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deksriptif maka peneliti dapat memperoleh data yang kredibel dan bermakna. Peneliti juga mampu menyajikan dan memberikan gambaran rinci mengenai identifikasi dan pemetaan masalah kebijakan untuk mengembangkan desa wisata regili di Desa Giri, Gresik.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Giri dengan pertimbangan bahwa Desa Giri merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata religi luar biasa di Kabupaten Gresik. Terbukti desa tersebut dapat menyumbang PAD yang sangat besar untuk pemerintah Kabupaten Gresik.

### **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian dilapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah melakukan pemetaan masalah kebijakan yang diharapkan dapat membantu pengembangan wisata religi di Desa Giri.

### **Teknik Penentuan Informan**

Informan atau sumber data dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata religi di Desa Giri. Informan yang dipilih adalah mereka yang mampu memberikan informasi yang sesuai dengan



substansi penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling (metode sampling bertujuan) yang juga dikenal sebagai judgmental sampling adalah jenis sampel yang bermanfaat untuk situasi khusus. Jenis ini biasa digunakan dalam riset eksplorasi atau riset lapangan. Sampling ini menggunakan penilaian seorang ahli dalam kasus, atau memilih kasus dengan tujuan tertentu dalam pemikirannya (Neuman, 2015). Yang artinya bahwa teknik penentuan informan dipertimbangkan terlebih dahulu bukan diacak, sehingga penentuan informan ditentukan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada subyek penelitian, yaitu pihak-pihak yang memahami dan berhubungan secara langsung dengan permasalahan penelitian. Berikut adalah daftar informan yang menjadi target didalam penelitian ini.

1. Kepala Desa Pemerintah Desa Giri
2. Kepala Keluarga dengan Ekonomi Menengah Kebawah
3. Mantan Ketua RT
4. Pedagang Souvenir di area Sunan Giri yang masih tetap buka
5. Pedagang Jajanan Khas Gresik
6. Pedagang Kaki Lima (Penjual Kue Keliling)
7. Pelaku UMKM (Usaha Laundry)
8. Ibu rumah tangga warga Desa Giri
9. Pelaku UMKM (Penjual Sop Buah dan Juice)
10. Pelaku UMKM Penjual Masker
11. Pedagang kaki lima (Penjual Ayam Kentucky)

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni dalam berbagai macam bentuk seperti foto, peta, wawancara terbuka, observasi, dan dokumen. Teknik pengumpulan data kualitatif disederhanakan menjadi dua kategori utama yakni penelitian lapangan (termasuk etnografi, observasi peserta, wawancara mendalam) dan penelitian historis komparatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian lapangan (field research) adalah penelitian kualitatif yang penelitiannya secara langsung mengamati dan mencatat orang-orang dalam penataan alamiah untuk jangka waktu yang lama (Neuman, 2015).

#### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Penelitian membutuhkan pembuktian berupa derajat kepercayaan data sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis. Pada penelitian ini, teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data. Triangulasi data memungkinkan peneliti untuk dapat mengecek ulang temuannya dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori. Pada penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara mendalam. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatan mengenai kondisi yang terjadi dengan jawaban hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara mendalam. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung kebijakan.
3. Membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari satu informan yang telah ditentukan akan dibandingkan dengan informan lainnya yang memiliki kesamaan topik.

#### **Teknik Analisa Data**

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Interactive Model yaitu metode yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Adapun tahapan dalam teknik analisis data adalah Pertama Pengumpulan Data (Data Collection). Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan berupa wujud kata-kata bukan rangkaian kata. Dan telah dikumpulkan dengan cara (observasi, wawancara, dokumen, pita rekaman). Dan yang biasanya “di proses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan atau alas tulis). Kedua, kondensasi Data (Data condensation). Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen - dokumen dan materi - materi empiris

lainnya. Dalam peelitian ini yakni mengelompokkan data untuk disederhanakan sehingga lebih memperjelas hasil data yang diinginkan untuk disajikan agar mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, penyajian data (Data display). Alur penting ketiga dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data dapat berupa grafik, bagan dan bentuk lainnya sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data merupakan proses menulis hasil temuan di lokasi penelitian yang sudah disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk data baik itu tulisan, grafik maupun gambar. Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion drawing or verification). Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal dan proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir, tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni menyimpulkan hasil penelitian dilokasi penelitian sehingga menyajikan hasil temuan yang ditulis pada penelitian ini. Serta menuliskan kesimpulan apa yang diporeh dalam melakukan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang berjudul Identifikasi dan Pemetaan Masalah Kebijakan Untuk Pengembangan Wisata Religi di Desa Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur maka berikut ini adalah hasil yang didapat dari responden penelitian saat terjun langsung ke lapangan:

1. Sifat dari masalah-masalah yang ada di Desa Giri
  - a. Masalah yang kompleks

Masalah yang kompleks melihat bahwa masalah itu bukan independen, masalah yang terjadi saling tergantung dengan masalah lain. Di Desa Giri yang memiliki wisata religi Sunan Giri dan berlokasi di dekat Kantor Desa Giri memiliki 3 Pengelola yang berbeda, yaitu Pengelola Makam, Pengelola Masjid dan Pengelola Pakir dan sewa stand, untuk stand di Pasar wisata dikelola oleh Kabupaten dan Tim

yang dibentuk oleh Desa. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Giri, dari Wisata Religi Sunan Giri terdiri dari retribusi parkir wisata, sewa stand pasar wisata, sedangkan untuk pengelolaan Makam Sunan Giri dan Masjid dikelola oleh Yayasan yang berbeda dan bukan bagian dari Desa. Terkait pengelolaan PAD Desa Giri antara pengelolaan makam, masjid, dan wisata religi Sunan Giri memiliki pengelolaan PAD-nya masing-masing sehingga memiliki kebijakannya masing-masing dan pengelolaan anggaran masing-masing didalam setiap organisasinya. Dan dari pemerintah desa Giri telah mengupayakan untuk menyatukan kebijakan dan pengelolaan PAD Giri antara pengelolaan makam, masjid, dan wisata religi Sunan Giri tetapi selalu mendapatkan penolakan dari organisasi dan masyarakat sekitar sehingga terdapat kesepakatan setiap organisasi memiliki kebijakannya tersendiri dalam pengelolaan PAD tersebut.

Desa Giri sebagai salah satu desa wisata religi, juga mendapat predikat desa kumuh, dalam mengatasi masalah ini Pemerintah Desa sendiri belum bisa menghilangkan predikat kumuh. Kondisi kumuh ini dapat dilihat dari lokasi Desa yang ada di sekitar obyek wisata religi Sunan Giri, yang padat dan terkesan tidak rapi, dalam 1 rumah bisa memilik 4-5 KSK, walaupun warganya tidak bertempat tinggal disana. Permasalahan ini sudah disampaikan ke warga untuk penduduk desa yang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Giri diminta untuk pindah KSK sesuai dengan tempat tinggalnya, tetapi ada keengganan dari penduduk desa. Keadaan ini tidak dipecahkan oleh desa, seharusnya masalah tersebut harus segera diatasi, bisa dalam bentuk peraturan desa atau peraturan lain. Selama ini di Desa Giri mengeluarkan kebijakan berupa peraturan desa hanya untuk kepentingan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Desa Giri, Bapak Khusnul Falach, SE menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Giri mengeluarkan Peraturan Desa seperti Pengelolaan MCK Plus, Penataan dan pengelolaan Pasar Wisata, penambahan modal BUMDES, dan Perdes lainnya. Peraturan Desa belum ada yang mengatur tentang pembatasan

kepemilikan KSK disatu alamat; Peraturan Desa yang mengatur tentang kebersihan lingkungan.

Ketidakinginan Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa dikarenakan dengan adanya peraturan desa membuat hubungan antar desa dengan masyarakat desa akan menjadi kaku. Pihak tata usaha menyampaikan bahwa selain untuk APBDES, Desa Giri sudah mempunyai peraturan desa tetapi terkait lingkungan dan pengelolaan PAD Giri antara pengelolaan makam, masjid, dan wisata religi Sunan Giri. Peraturan Desa menyebutkan tentang kesepakatan setiap organisasi memiliki kebijakan tersendiri dalam pengelolaan PAD tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan desa wisata adalah perlunya mengadakan lokakarya untuk menggagas penyiapan kebijakan/ peraturan pemerintah terkait persyaratan dan penyelenggaraan desa wisata. Hal ini diperlukan sebagai dasar pijakan penyelenggaraan desa wisata (Manisa, 2020).

Masalah lain, yaitu mengenai kebersihan dan pengembangan UMKM. Pemerintah Desa Giri tidak memiliki PERDES khusus terkait kebijakan pengelolah lingkungan, terkait pengelolaan, kebersihan, dan lain-lain, lebih ditekankan kepada setiap RT yang di Desa Giri dan untuk sekitar lingkungan instansi dan wisata religi memiliki petugas masing-masing yang dikelola setiap organisasinya namun, dimasa PPKM ini petugas kebersihan hanya beroperasi satu kali 24 jam, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dari masyarakat sekitar dan wisatawan yang sesekali berkunjung ke area wisata Sunan Giri. Lingkungan yang bersih serta petugas berpakaian bersih dan rapi menjadi faktor penentu bagi setiap wisatawan agar betah dalam berkunjung ke objek wisata (

Langkah yang diambil untuk mengubah image sebagai desa kumuh, dari pihak instansi Desa Giri telah melakukan sosialisasi terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan tetapi pemerintah desa tidak memiliki kebijakan terkait peraturan lingkungan secara paten sehingga kebersihan lingkungan tersebut dikelola oleh setiap RT-nya dan kesadaran individu setiap masyarakatnya, dan untuk kebersihan di sekitar area Balai Desa dan

tempat parkir masih tetap berjalan tetapi tidak semaksimal sebelum pandemi karena pihak desa memaparkan sendiri kekurangan dana untuk membayar pekerja kebersihan tersebut dengan alasan pemasokan yang mereka dapatkan dari pembayaran sewa ruko yang dikelola oleh Pemerintah Desa berhenti total.

b. Keanekaragaman masalah

Adanya kesulitan dari masalah di Desa Giri, dimana masalah satu dengan masalah lainnya saling berhubungan, maka pada bagian ini akan melihat penyebab dari masalahnya. Penyebab masalah bisa dilihat dari kondisi mata pencaharian dari masyarakat yang tinggal di Desa Giri sangat heterogen dengan jumlah yang hampir sama untuk setiap bidang pekerjaan. Sebelum tahun 1997 masyarakat Desa Giri sangat makmur dikarenakan sebagian besar sebagai pembuat kerajinan emas. Setelah itu, keadaan mengalami perubahan karena suplai emas tidak ada lagi, masyarakat yang tadinya sudah terbiasa hidup enak menjadi malas bekerja. Akibatnya, banyak masyarakat yang bekerja wiraswasta dan bidang pekerjaan (UMKM) lainnya. Keanekaragaman ini menjadi penyebab tersendiri yang ada dimasyarakat. Dimasa Pandemi UMKM di Desa Giri ikut mengalami krisis. Contohnya, UMKM pengerajin emas (sebelum krisis moneter), wiraswasta, ojek online, travel, pembuat kue, yang pendapatannya mengandalkan dari jumlah pengunjung wisata religi, tetapi karena adanya Covid mengalami penurunan dratis.

Keadaan ini, seperti yang dikeluhkan Masyarakat Desa Giri, yang bekerja sebagai wiraswasta (berdagang di pasar wisata Sunan Giri), dan dimasa pemberlakuan kebijakan PPKM beralih ke ojek online. Pemerintah Desa kurang adanya atau bisa dikatakan lepas tangan tanggung jawab atas tugas-tugasnya, dan seharusnya warga yang terdampak kebijakan PPKM ini diberikan subsidi bantuan sosial, selama ini tidak mendapatkan bantuan sama sekali, yang didapatkan hanya tampungan yang dikeluhkan dari warga dan tidak ditindaklanjuti dari pihak Kepala Desa Desa Giri. Sebelum adanya kebijakan PPKM berpenghasilan kurang lebih 2 juta per bulannya, tetapi setelah adanya kebijakan PPKM ini turun drastis, karena wisata Sunan Giri ditutup sampai

sekarang. Dikarenakan bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, dan harus membayar tempat berjualan atau lapak yang masih dibayar setengah harga sewa sebelum PPKM berlangsung. Selaku pengurus infrastruktur Desa Giri hanya merenovasi tempat Wisata Sunan Giri saja, melainkan warganya atau pemberdayaan masyarakat sekitar kurang diperhatikan. Terkait kebersihan disana ada petugas tetapi hanya ada waktu sebelum PPKM berlangsung, pada saat ppkm berlangsung petugas kebersihan tidak pernah terjun kemasyarakat. Dan di desa ini kurang adanya transparansi data, dan menuai banyak pertanyaan, dan kurang adanya memperhatikan penataan data penduduk, dan tidak ada sosialisasi terkait apapun yang seharusnya dari pemerintahan desa mengadakan sosialisasi pengembangan UMKM, kebersihan lingkungan, penataan data penduduk dan lain-lain.

Masalah tidak adanya bantuan bagi UMKM terdampak covid juga dikeluhkan oleh Pedagang Souvenir di area Sunan Giri yang masih tetap buka, namun saat PPKM menyebabkan tidak ada pengunjung, membuat souvenir dagangannya tidak ada yang beli. Peraturan PPKM dalam bentuk penutupan area makam Sunan Giri menyebabkan kerugian bagi pedagang yang lain, terutama pedagang yang menjual makanan dan camilan ringan biasanya diborong pengunjung sebagai oleh-oleh. Banyaknya stok makanan yang tidak terjual menyebabkan pedagang akan membuang dengan alasan sudah kadaluwarsa dan atau tidak layak dikonsumsi. Walaupun pedagang menutup lapaknya mereka harus tetap membayar biaya sewa setengah harga, kondisi ini menyebabkan pedagang merasa sangat terbebani karena hal tersebut. Keadaan ini juga dapat dilihat dari masyarakat Desa Giri yang berkerja sebagai :

1. Pedagang Kaki Lima (Penjual Kue Keliling). Sebagai seorang pedagang kue keliling yang setiap hari harus menjajahkan dagangannya karena tuntutan uang setoran, sangat merasakan dampak dari pandemi ini yang semakin hari tingkat angka positif COVID-19 semakin tinggi di Kabupaten Gresik yang membuat orang-orang tidak lagi suka

membeli makanan dari luar karena timbul ketakutan akan tertular virus COVID-19. Timbulnya banyak presepsi seperti ini banyak merugikan pedagang terutama pedagang seperti dirinya.

2. Pelaku UMKM (Usaha Laundry), mengeluhkan tidak adanya bantuan dari pihak pemerintah setempat terhadap dampak pandemi imbas berlakunya PPKM. Penutupan area makam mengalami banyak kerugian, ditambah lagi petugas kerbersihan yang sering kali telat melakukan tugasnya membersihkan area makam, imbasnya pelaku UMKM juga sering ikut membersihkan area lingkungannya, dan lagi masih tetap membayar sewa setengah harga. Hal ini sangat terbebani dengan adanya kebijakan seperti ini.
3. Pelaku UMKM (Penjual Sop Buah dan Juice). Tidak adanya bantuan yang diberikan pihak perangkat desa kepada pedagang yang juga termasuk kedala orang-orang yang terdampak pandemi. Banyak kerugian selama penutupan makam Sunan Giri imbas dari PPKM. Penutupan area makam merugikan banyak para pedagang, saat ini karena tidak ada pengunjung maka pedagang banyak yang membuang stok barang dagangannya dikarenakan sudah kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi. Meskipun pedagang menutup lapaknya mereka harus tetap membayar sewa dengan setengah harga, mereka merasa sangat terbebani karena hal tersebut.
4. Pelaku UMKM Penjual Masker. Selama awal diberlakukannya PPKM tingkat pembeli dan angka pendapatan menurun drastis dikarenakan imbas dari penutupan wisata religi Sunan Giri sehingga tingkat wisatawan yang berkunjung berhenti total. Sehingga pemasukan yang didapatkan berasal dari warga sekitar Desa Giri, dan ketika menanyakan terkait apakah mereka mendapat bantuan sosial (BANSOS) selama masa pandemi dari pemerintah desa, mereka menjawab tidak mendapatkannya.
5. Pedagang kaki lima (Penjual Ayam Kentucky). Penjual mengeluhkan

penerapan PPKM level 4 yang terus di perpanjang, kebijakan yang membatasi jam buka dan membatasi layanan makan di tempat membuat pengunjung tidak lagi datang untuk makan di tempat, sehingga yang tersisa hanya pembeli yang membungkus makanannya untuk di bawa pulang. Penurunan omset dagang sangat dirasa oleh pedagang jika di hari biasa bisa melayani 80-100 porsi dimasa PPKM ini hanya menerima 40-50 porsi. Tidak adanya bantuan sosial Covid membuat penjual kesulitan mencari modal penjualan, namun penjual tetap bertahan dengan layanan take away atau dibungkus, menurutnya itu cara mereka untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi terutama penerapan PPKM saat ini.

6. Mantan Ketua RT. Peran pemerintah desa yang menindak lanjut program pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Bantuan yang diberikan berupa bansos, BLT dan lain sebagainya sudah dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai arahan dari pemerintah. Kepedulian pemerintah desa sudah dianggap semestinya baik berupa pelayanan maupun penyelenggaraan program yang diberikan.

## 2. Selain Sifat Permasalahan

Sifat masalah yang ingin dipecahkan melalui kebijakan, pelaksanaan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Melihat penjelasan pada bagian sebelumnya, kondisi Desa Giri sangat dipengaruhi oleh :

1. Perubahan kondisi sosial. Masyarakat yang tinggal di Desa Giri Sebagian besar masih ada garis keturunan dengan Sunan Giri. Kebesaran nama Sunan Giri sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat luas tidak hanya di Gresik saja tetapi juga di Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia dan dunia. Perkembangan jaman yang serba digital ini, masyarakat dan pemerintahnya Desa Giri kurang memanfaatkan fasilitas ini, cerita ataupun berita tentang Desa Giri masih sangat minim. Jika Pemerintah Desa Giri tidak berbenah untuk menata desanya, tidak menutup kemungkinan jumlah pengunjung yang datang

hanya dari golongan masyarakat yang fanatik saja. Apabila keadaan ini tidak segera diatasi, lambat laun dapat berakibat pada kehidupan perekonomian masyarakatnya.

2. Perubahan kondisi ekonomi dapat dilihat dari adanya perubahan pekerjaan dari pengrajin emas berpindah ke pekerjaan lain. Kenyamanan pekerjaan sebagai pengrajin emas dengan penghasilan yang besar berakibat masyarakat menjadi malas bekerja dibidang lain. Walaupun Pemerintah Desa sudah berulang kali memberikan motivasi dan mengadakan pembinaan, hasilnya tidak memuaskan. Masyarakat tidak berminat, masyarakat masih terkungkung pada masa kejayaan sebagai pengrajin emas.

Data mengenai sifat masalah dan selain sifat masalah diatas, dapat memberikan informasi dalam mendefinisikan masalah sehingga dapat diketahui kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotesis pertama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kapabilitas inovasi terhadap kinerja pemasaran. Inovasi produk memberikan dampak pada lingkungan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar dan menyesuaikan dengan segmen pasar dari inovasi produk yang ditawarkan. Kinerja pemasaran dipengaruhi oleh pikiran, pengetahuan serta perilaku konsumen dari pelanggan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dapat disimpulkan bahwa kapabilitas inovasi yang semakin tinggi akan diikuti dengan semakin tinggi kinerja pemasaran dari perusahaan. Kedua, hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotesis kedua juga menjawab adanya pengaruh positif dan signifikan kapabilitas responsive terhadap kinerja pemasaran. Hasil tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kapabilitas responsif terhadap kinerja pemasaran. Responsive kapabilitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi bisnis untuk memantai dan menganalisis serta merespon dengan cepat dan positif terhadap perubahan pasar yang dinamis, dimana dengan adanya kemampuan merespon pasar dapat memberikan dampak positif kepada kinerja pemasaran. Kapabilitas responsif yang semakin

tinggi akan diikuti dengan semakin tinggi kinerja pemasaran dari perusahaan.

## REFERENCES

- Arivin, Z. (2018). *Dongkrak PAD, DPRD Gresik 'Berguru' Tata Kelola Wisata di Bandung*. Diakses Mei 05 2021 dari <https://faktualnews.co/2018/03/11/dongkrak-pad-dprd-gresik-berguru-tata-kelola-wisata-bandung/70906/>.
- As. (2021). *Gresik Menuju Kawasan Wisata Religi*. Diakses Mei 05 2021 dari <http://ikonkata.com/berita/index/gresik-menuju-kawasan-wisata-religi>.
- BPS. (2020). *Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Orang), 2017- 2019*. Diakses Mei 05 2021 dari <https://www.bps.go.id/indicator/16/1189/1/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara.html>.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Desagiri.com. (2021). *Wisata Religi*. Diakses Mei 05 2021 dari <http://desagiri.com/category/wisata-dan-produk-unggulan/wisata/religi-wisata/>.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi ke 5*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Elmaningias, P. (2017). Kontribusi Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gresik Tahun 2009-2015. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 677-685.
- Leman, L.A. (2018). Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 1-11.
- Manisa T, W. (2020), Penyelenggaraan Desa Wisata Di Kabupaten Lebak, *Public Administration Journal of Research*, 2 (4), 353-365.
- Milles, M.B., Huberman, M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.
- Mustopadidjaya, A.R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Neuman, W.L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Setiawan, F.A. (2020). *Gresik Terima Penghargaan Runner Up Kategori Daya Tarik Wisata Budaya*. Diakses Mei 05 2021 dari <https://memorandum.co.id/gresik-terima-penghargaan-runner-up-kategori-daya-tarik-wisata-budaya/>.
- Susanto, J., Usman, y., Marlina, E., Anggraini, Z., Chotib., H.M. 2021. Implementasi Sapta Pesona Di Objek Wisata Mengkarang Purba Desa Bedeng Rejo Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 61-86.
- Sofia, H. (2019). *Lima tahun mengantarkan pariwisata Indonesia jadi sektor utama*. Diakses Mei 05 2021 dari <https://www.antaraneews.com/berita/1123250/lima-tahun-mengantarkan-pariwisata-indonesia-jadi-sektor-utama>.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Thomas R. Dye. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- O. Jones, C. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Cetakan I*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Pendit, N.S. (2003). *Pengantar ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Widowati, H. (2019). *5 Tahun Terakhir, Rerata Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 14%*. Diakses Mei 05 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/17/5-tahun-terakhir-rerata-pertumbuhan-kunjungan-wisawatan-mancanegara-14>.
- Zuliana, I. & Murtini, S. (2019). Analisis Potensi dan Interaksi Antar Objek Wisata Religi di Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa*, 1(2), 1-8.